

BAB V

KESIMPULAN

MUI didirikan pada tahun 1975 dengan tujuan: *pertama*, memberikan fatwa atas berbagai persoalan keagamaan. *Kedua*, mempererat tali persaudaraan Islam dan memelihara toleransi dengan kelompok agama lain. *Ketiga*, mewakili umat Islam dalam komunikasi dengan kelompok agama-agama lain. *Keempat*, berperan menjadi mediator pemerintah dan ulama, dan menerjemahkan kebijakan pemerintah agar mudah dipahami masyarakat umum.

Memahami karakteristik kepemimpinan seseorang termasuk Ketua Umum MUI harus dipahami dari dua hal, yaitu *pertama*, karena faktor lingkungan sosial, budaya, politik yang membentuknya sehingga memiliki karakteristik seperti itu (faktor bawaan) dan *kedua*, karena faktor lingkungan sosial yang dihadapinya yang mengharuskan dia melakukan hal tertentu. Keberlangsungan MUI pada masa Orde Baru secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Dengan demikian, memahami latar belakang kehidupan serta situasi dan kondisi yang dihadapinya saat memimpin merupakan langkah untuk menganalisis gaya kepemimpinan Ketua Umum MUI.

Latar belakang kehidupan sosial budaya dan politik berpengaruh besar dalam pembentuk karakter dan gaya kepemimpinan Hamka, Syukri Ghozali, dan Hasan Basri saat memimpin MUI. Hubungan Islam dan Negara pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin tidak stabil. Situasi itu diakibatkan adanya

pertarungan ideologi yang disebabkan perbedaan penafsiran tentang Islam dan arti ideologi antara kalangan Islam dan Nasionalis, baik yang terjadi di Konstituante, maupun pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII. Situasi pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin dijadikan rumusan bagi pengambilan kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap agama terutama Islam. Orde Baru yang merupakan pemerintahan yang dikuasai oleh militer sangat “traumatik” dengan munculnya Islam politik sebagai akibat pertempuran-pertempuran yang harus mereka hadapi ketika melawan DI/TII dan PRRI/Permesta.

Kelahiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang tidak dapat dilepaskan dari konteks kepentingan pemerintah Orde Baru. Hal itu dapat dilihat dari fakta bahwa munculnya Orde Baru yang kurang berpihak pada Islam telah memunculkan sikap frustrasi dan hilangnya kepercayaan diri dari kalangan Islam sendiri. Hal tersebut berbuntut dialihkannya pola dakwah kaum modernis dari politik ke bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi. Mereka berkeyakinan bahwa dengan menggunakan jalur dakwah sosial kemasyarakatan, Islamisasi masyarakat Indonesia akan dapat disempurnakan, sehingga dengan cara ini, Islam suatu saat nanti akan benar-benar mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain menimbulkan kekecewaan besar dari umat Islam, kebijakan pemerintah Orde Baru telah memunculkan rasa curiga dari kalangan Islam, sebaliknya pemerintah semakin yakin bahwa halangan dalam merealisasikan kebijakan-kebijakannya adalah dengan mengendalikan umat Islam. Tujuan didirikan MUI menurut Mukti Ali adalah untuk menjembatani antara aspirasi pemerintah dan aspirasi umat Islam. Nampaknya pemerintah sangat berharap

lembaga yang Baru terbentuk itu memiliki kewibawaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dan secara politik, pemilihan Hamka merupakan suatu upaya untuk meraih tokoh-tokoh *eks* Masyumi, sehingga pemilihan Hamka sebagai sosok ulama yang sudah dikenal luas orang baik kepribadian maupun pemikiran-pemikirannya merupakan pilihan yang tidak dapat ditawar lagi.

Pengalaman masa muda Hamka sangat berperan besar dalam membentuk corak kepribadian Hamka yang segar, retorik, tegas, fleksibel dan "*Pemberontak kemapanan*" atau -jika meminjam istilah yang digunakan Nurcholis Madjid *independent mindedness*. Pengalamannya di Muhammadiyah dan interaksi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional telah membuat Hamka menaruh perhatian besar pada persolan umat Islam serta ketegasannya dalam menghadapi upaya pendangkalan aqidah dan proses kristenisasi. Namun sikap tegasnya tersebut diimbangi oleh sikap fleksibel yang dimilikinya sebagai wujud karakternya yang dibentuk dari budaya merantau dan kecintaannya pada sastra. Sementara pengalaman buruk di dunia politik telah membuat Hamka untuk lebih fokus dalam dakwah sosial daripada dakwah melalui dunia politik. Hal tersebut terlihat dalam gayanya saat memimpin MUI. Dengan modal ketenaran namanya, sifat kharismatik, dan fleksibel, Hamka mampu membuat MUI dapat diterima oleh semua kalangan. Namun, ketegasan sikap dan berani frontal dengan pemerintah telah membuat hubungan MUI dan pemerintah menjadi renggang, dan pemerintah menjadi tersadarkan untuk lebih mengendalikan MUI. Sikap tegasnya dilatar belakangi oleh sikap pemerintah yang mengeluarkan kebijakan yang

dinilainya bertentangan dengan Islam, dan Hamka tidak dapat berkompromi soal itu.

Syukri Ghazali yang mewarisi karakteritik ulama *salafiyah* yang memiliki karakteristik yang tenang dan pendiam, beliau tidak memiliki kemampuan lebih dalam hal orasi dan menulis. Sifat tenang dan karakter ulama NU yang cenderung akomodatif dengan pemerintah telah mampu mengembalikan kembali kepercayaan pemerintah terhadap MUI setelah sebelumnya renggang akibat konflik dengan Hamka. Dengan kemampuannya dalam bidang hukum Islam, MUI dapat produktif dalam mengeluarkan fatwa, baik ketika dia menjadi ketua komisi fatwa (1975-1981), maupun ketika menjadi Ketua Umum (1981-1984). Syukri Ghazali telah memberikan landasan MUI untuk lebih mengembangkan dakwah dalam bidang kemasyarakatan yang manfaatnya secara nyata dirasakan oleh rakyat, yang kemudian hal tersebut dilanjutkan oleh penerusnya, Hasan Basri.

Hasan Basri merupakan sosok ulama cerdas dan politikus ulung. Lingkungan Banjarmasin telah mendidiknya untuk menjadi muslim yang taat, sementara Muhammadiyah dan PSI telah memberikan dasar pemikiran pembaharuan dan kemampuan dasar politik Hasan Basri. Kegagalan politik Islam pada masa Orde Lama dan Orde Baru telah membawa Hasan Basri untuk mengalihkan strategi dakwah pada bidang sosial kemasyarakatan dan menjadi bagian dari kelompok reformis yang berusaha memperjuangkan Islam secara sosio-ekonomis, serta mementingkan kelenturan kerja sama dengan kekuatan sekuler dan militer. Hal itulah yang menjadi ciri MUI pada masa kepemimpinannya. MUI menjadi mitra terdekat pemerintah dalam program-

program kemasyarakatan. Hal tersebut berdampak positif dan negatif bagi MUI. Dampak positifnya adalah program-program MUI dapat dilaksanakan dengan lancar dan mendapat sokongan penuh dari pemerintah, termasuk program-program *syariah* seperti Badan Amil Zakat Nasional, Bank Muamalat dan LP POM. Dampak negatifnya MUI menjadi lembaga yang dinilai masyarakat menjadi kaki tangan pemerintah.

Namun terlepas dari anggapan tersebut, MUI telah memberikan sumbangsih yang besar bagi umat Islam Indonesia. Anggapan orang MUI sebagai lembaga “kaki tangan” pemerintah lebih disebabkan kurangnya MUI menampung aspirasi dari masyarakat. MUI dalam perjalanannya berusaha untuk membangkitkan Umat Islam Indonesia dari keterpurukannya, dan MUI memilih jalan dakwah sosial kemasyarakatan untuk memecahkan persoalan tersebut. Perlu ada upaya yang lebih sistematis dan mengarah pada aspek pengembangan *fikriyah* (pemikiran Islam), apalagi MUI merupakan lembaga musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim, dan tidak terlalu difokuskan pada bidang sosial kemasyarakatan yang memang merupakan tanggung jawab dari pemerintah. MUI harus kembali memfokuskan pada pengembangan aspek pemikiran Islam, sehingga Islam mampu menjadi solusi dari segala permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Bukankah Islam mempunyai solusi integral dalam permasalahan politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan berbagai bidang kehidupan lainnya?. Hal inilah yang menjadi *home work* bagi MUI.

Selain itu MUI harus menghindarkan diri menjadi lembaga *elite* yang mempunyai jarak tertentu dengan masyarakat. Apalagi kedekatannya dengan

pemerintah telah menjadikan lembaga ini berkedudukan seperti lembaga negara lainnya. MUI tidak boleh lupa bahwa mereka adalah ulama bukan pejabat yang memang dalam sejarahnya merupakan kelompok yang tidak terpisahkan dan berbaur dengan kehidupan masyarakat umum. Hamka, Syukri Ghazali dan Hasan Basri telah memberikan warisan kepribadian dan pondasi yang kokoh untuk digunakan dalam lebih mengembangkan dan memajukan MUI ini, sehingga Ulama benar-benar menjadi generasi *penerus para nabi*, bukan generasi *pengabdian para penguasa negeri*.

